







Secara konsisten BRI Syariah terus mengembangkan berbagai strategi dan inisiatif untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan. Salah satunya adalah membangun kerjasama strategis dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dalam bentuk memanfaatkan jaringan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk membangun kantor layanan syariah perusahaan yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Pada tahun 2013, BRI Syariah merintis usaha dalam upaya meningkatkan status bank sebagai bank devisa untuk direalisasikan pada tahun 2014 sesuai izin Bank Indonesia No.15/2272/Dpbs.

Sidoarjo merupakan salah satu kota potensial di tanah air. Sidoarjo juga menjadi perhatian manajemen BRI Syariah. Pada tahun 2009 berdiri beberapa kantor cabang BRI Syariah salah satunya yaitu kantor cabang Sidoarjo Ahmad Yani yang memiliki 8 kantor cabang pembantu di antaranya kantor cabang pembantu BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo yang berdiri pada tanggal 14 Juni 2013. BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo bertempat di Jalan Raya Ngelom No. 62 Sepanjang Sidoarjo. Kantor cabang ini berlokasi strategis sehingga hal itu memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan di kantor BRI Syariah tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Tim Praktik Kerja Lapangan, *Laporan Kerja Lapangan di KCP BRI Syariah Sepanjang Sidoarjo*, 2016, 10.

































dituangkan dalam memorandum pengusulan *take over* pembiayaan mikro dan diserahkan kepada *unit head* untuk memeriksa semuanya itu, diteliti kembali kesesuaiannya. Kemudian setelah sesuai dari *unit head*, berkas pengusulan diserahkan kepada pemimpin cabang pembantu. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan persetujuan pembiayaan. Keputusan tersebut diberikan terkait dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, meliputi sumber dana yang akan digunakan untuk melunasi pinjaman, dan ketepatan waktu yang disesuaikan dengan berkas pengusulan. Setelah mendapat persetujuan, dari pemimpin cabang pembantu kemudian diserahkan kepada pemimpin kantor cabang untuk mendapatkan keputusan apakah nasabah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak.

Apabila disetujui maka dibuatkan SP3 (Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan) atau OL (*Offering Letter*), persetujuan atas pengajuan *take over* pembiayaan mikro yang disampaikan kepada calon nasabah secara tertulis dalam bentuk SP3/OL yang dipersiapkan oleh *account officer* mikro kemudian direview oleh *legal officer* dan ditandatangani oleh yang berwenang untuk mewakili bank di unit bisnis (Pimpinan Cabang Sidoarjo). Namun, jika setelah dianalisa status dari calon nasabah ternyata ‘tidak aman’ maka untuk permohonan yang ditolak disampaikan kepada calon nasabah secara tertulis dalam bentuk *rejection letter*.

Tahap selanjutnya jika calon nasabah yang dinyatakan “aman” menyetujui penawaran yang disampaikan, maka OL (*Offering Letter*) asli tersebut harus ditandatangani oleh calon nasabah di atas materai dan

dikembalikan kepada pihak bank paling lambat pada saat akad pembiayaan. Setelah penandatanganan OL maka secara resmi calon nasabah menjadi nasabah *take over* pembiayaan mikro.

Tahap selanjutnya, nasabah dan pihak BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo melakukan konfirmasi ke bank kreditur awal bahwa kredit atas nama nasabah yang bersangkutan akan diambilalih, sehingga dengan demikian akan dilakukan pelunasan oleh nasabah pada hari, tanggal, dan jam yang telah disepakati. Dengan menyepakati waktu *take over* ini, memberikan waktu kepada pihak bank kreditur awal untuk mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *take over* seperti dokumen-dokumen dan surat-surat (rincian total kewajiban/*outstanding* pinjaman nasabah yang akan *ditake over*, asli bukti kepemilikan jaminan/sertifikat atas nama debitur apabila telah balik nama, asli Sertifikat Hak Tanggungan, Surat Roya ke BPN, dan bukti pelunasan pembiayaan atas nama calon nasabah). Sebelum proses *take over* dijalankan, BRI Syariah KCP Sidoarjo sudah harus menerima Surat Pernyataan dari nasabah yang menyatakan bahwa nasabah bersedia untuk menandatangani akta akad pembiayaan dan akta pengikatan jaminan atas objek pembiayaan dengan Hak Tanggungan untuk kehati-hatian bank.

Pada hari yang telah disepakati dilaksanakannya proses *take over*, dimana debitur didampingi *account officer* mikro dan *legal officer* menuju ke bank kreditur awal untuk melakukan pelunasan hutang nasabah dengan dana yang diperoleh dari BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo dengan menggunakan akad *qard*. Selama proses *take over* berjalan, nasabah harus selalu didampingi

untuk menghindari adanya *i'tikad* tidak baik seperti melarikan diri dengan membawa uang pelunasan.

Pelaksanaan *take over* idealnya dilakukan pada awal jam kerja kantor kedua bank, tujuannya agar penyelesaian mulai dari pelunasan, penyelesaian berkas-berkas dokumen, keluar surat roya, dan penyerahan asli sertifikat jaminan dapat diselesaikan pada hari yang sama dengan penandatanganan akta akad pembiayaan dan akta pengikatan jaminan (dalam bentuk SKMHT), agar terpenuhi syarat formil dari akta Notaris berupa kepastian tanggal, hari, dan waktu pelaksanaannya.

Setelah proses pelunasan dari bank kreditur awal selesai dilakukan dan barang jaminan sudah menjadi hak milik nasabah, selanjutnya dilaksanakan penandatanganan akta akad pembiayaan, dalam hal ini akad yang digunakan adalah *murābahah* (jual-beli) dan dilakukan pengikatan jaminan dalam bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dengan dihadiri oleh calon nasabah dan pasangannya (jika ada) serta pihak BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo dihadapan notaris. Dengan catatan penandatanganan akta akad pembiayaan *murābahah* hanya dilaksanakan setelah pihak bank menerima:

- 1) Asli bukti kepemilikan jaminan (sertifikat) atas nama nasabah.
- 2) Asli Sertifikat Hak Tanggungan atas nama nasabah.
- 3) Surat Roya ke BPN atas pelepasan Hak Tanggungan.

BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo memberikan persyaratan bahwa penyerahan jaminan dari nasabah ke BRI Syariah KCP Sepanjang Sidoarjo















namun sengaja atau lalai dan tidak bertitikad baik untuk membayar. Adapun dana dari denda atas keterlambatan yang diterima oleh bank akan diperuntukkan sebagai dana sosial.

Sedangkan hak bagi bank yaitu bank berhak untuk menagih pembayaran dari nasabah atas seluruh atau sebagian jumlah utang nasabah kepada bank berdasarkan akad *qard*, untuk dibayar dengan seketika tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa sebagai berikut: 1) nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan utang tepat pada waktu yang telah ditetapkan. 2) dokumen atau keterangan yang dimasukkan/disuruh masukkan ke dalam dokumen yang diserahkan nasabah kepada bank adalah palsu, tidak sah, atau tidak benar. 3) nasabah atau pihak yang mewakili nasabah dalam akad menjadi pemboros, pemabuk atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti karena tindak pidana yang dilakukannya. 4) nasabah tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih. 5) nasabah masuk dalam daftar kredit macet dan atau daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain yang terkait. 6) nasabah memberikan keterangan baik lisan atau tertulis yang tidak benar dalam arti materiil tentang keadaan kekayaannya, penghasilan, barang jaminan dan segala keterangan atau dokumen yang diberikan kepada bank sehubungan utang nasabah kepada bank atau jika nasabah menyerahkan tanda bukti penerimaan uang dan atau surat pemindahbukuan yang























